



# RENCANA AKSI KEGIATAN 2025-2029



**Balai Besar Laboratorium  
Kesehatan Lingkungan**

---

DITJEN KESEHATAN PRIMER  
DAN KOMUNITAS



## Daftar Isi

Daftar Isi.....	2
Daftar Tabel.....	4
Daftar Gambar.....	5
Kata Pengantar .....	6
BAB I.....	7
PENDAHULUAN .....	7
A. Kondisi Umum.....	7
B. Potensi dan Tantangan.....	8
1. Potensi .....	8
2. Tantangan.....	8
BAB II.....	10
VISI, MISI, DAN TUJUAN KEMENTERIAN KESEHATAN .....	10
A. Visi dan Misi Kementerian Kesehatan .....	10
B. Tujuan Kementerian Kesehatan.....	11
C. Sasaran Strategis Kementerian Kesehatan .....	11
BAB III.....	13
Rencana Aksi Program Direktorat Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas .....	13
A. Kebijakan .....	13
B. Strategi Ditjen Kesehatan Primer dan Komunitas.....	14
C. Kerangka Kelembagaan .....	15
D. Rencana Program Ditjen Kesprimkom.....	15
E. Kerangka Logis Program Kesehatan primer dan komunitas.....	18
BAB IV.....	19
Rencana Aksi Kegiatan .....	19
Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan.....	19
A. Kerangka Kelembagaan .....	19
B. Kerangka Logis .....	21
C. Rencana Kegiatan.....	25
BAB V.....	26
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN .....	26
A. Target Kinerja .....	26
B. Kerangka Pendanaan.....	27
C. Analisis Indikator Kinerja Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan.....	27

D. Analisis Indikator Kinerja Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan Berdasarkan Kriteria Achievable, Menantang dan Realistis .....	30
BAB VI.....	33
PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PENGENDALIAN .....	33
A. Pemantauan .....	33
B. Evaluasi.....	34
C. Pengendalian.....	34
BAB VII.....	35
PENUTUP.....	35

## Daftar Tabel

Tabel 1 Sasaran Strategis Kementerian Kesehatan .....	11
Tabel 2 Misi, Sasaran Strategis (dan Indikator Sasaran Strategis) yang didukung oleh Ditjen Kesehatan Primer dan Komunitas .....	16
Tabel 3 Tabel Sasaran Program (termasuk Indikator Kinerja Program (IKP)) Ditjen Kesehatan Primer dan Komunitas dan keterkaitannya terhadap sasaran strategis Kementerian Kesehatan .....	16
Tabel 4 Analisis SMART Indikator Kinerja Kegiatan .....	21
Tabel 5 Target Kinerja Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan Tahun 2025 .....	26
Tabel 6 Analisis Indikator Kinerja Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan .....	27
Tabel 7 Analisis Indikator Kinerja Kegiatan Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan Berdasarkan Kriteria Achievable, Menantang dan Realistis ....	31

## Daftar Gambar

Gambar 1 Struktur Organisasi Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan	20
Gambar 2 Cascading Kinerja Kegiatan Teknis .....	24

## Kata Pengantar

Dengan rasa syukur atas anugerah dan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, kami menyampaikan bahwa dokumen Rencana Aksi Kegiatan (RAK) Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan untuk Tahun 2025-2029 telah diselesaikan. RAK ini cerminan dari target kinerja antara Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan dengan Direktorat Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas.

Dokumen RAK ini memuat berbagai kebijakan, sasaran strategis, indikator, dan target yang rencanakan untuk dicapai dalam kurun waktu lima tahun mendatang (2025-2029). RAK ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan, sehingga pelaksanaannya menjadi lebih terarah dan terukur. Selain itu, dokumen ini juga berfungsi sebagai panduan bagi para pengambil kebijakan di lingkungan Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan untuk mendukung upaya pembangunan kesehatan secara efektif.

Melalui penyusunan Rencana Aksi Kegiatan ini, diharapkan terwujud pedoman yang jelas dan komprehensif dalam pengelolaan program, mencakup tahapan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, hingga evaluasi terhadap pencapaian output. Dokumen ini juga menjadi dasar dalam menilai tingkat akuntabilitas kinerja program di Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan.

Salatiga, 15 Januari 2025

Kepala

Akhmad Saikhu, SKM, MSc.PH

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Kondisi Umum

Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bawah Direktorat Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas, Kementerian Kesehatan, yang telah mengalami transformasi kelembagaan seiring dengan berlakunya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 27 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan. Transformasi ini menjadi bagian dari proses penyesuaian kelembagaan nasional tahun 2024, di mana seluruh UPT di bawah Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan dialihkan ke dalam pembinaan Direktorat Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas.

Perubahan nomenklatur Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat menjadi Direktorat Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2024 turut memperkuat arah transformasi kelembagaan. Pergantian nomenklatur ini mencerminkan fokus kebijakan kesehatan yang lebih menitikberatkan pada penguatan pelayanan kesehatan primer, peningkatan peran komunitas dalam pembangunan kesehatan, serta integrasi layanan kesehatan yang dekat dengan masyarakat. Dengan adanya perubahan ini, Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan memperoleh peran strategis dalam mendukung fungsi Direktorat Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas, terutama terkait pengelolaan laboratorium lingkungan, pengawasan kualitas kesehatan lingkungan, serta dukungan promotif dan preventif di tingkat primer.

Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan kesehatan nasional yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2025–2029 memiliki peran penting dalam menyusun dan menyelaraskan Rencana Aksi Kegiatan (RAK) sebagai turunan dari Rencana Aksi Program (RAP) yang disusun oleh unit eselon I. Penyusunan RAK ini dilakukan dengan mengacu pada Rencana Strategis Kementerian Kesehatan 2025–2029 serta berbagai ketentuan perencanaan strategis lainnya, seperti Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Nomor 5 Tahun 2019 dan Nomor 6 Tahun 2020.

Komitmen Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan diarahkan pada peningkatan efektivitas pengelolaan laboratorium kesehatan lingkungan, penguatan koordinasi, serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya. Upaya ini diharapkan mampu mendukung terwujudnya sistem kesehatan primer dan komunitas yang tangguh, merata, dan berkeadilan sesuai dengan arah kebijakan nasional sektor kesehatan.

## B. Potensi dan Tantangan

### 1. Potensi

Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan memiliki potensi strategis yang signifikan dalam mendukung peningkatan kualitas kesehatan lingkungan nasional pada periode 2025–2029. Dengan didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten dan berpengalaman, fasilitas laboratorium yang telah terakreditasi, serta jaringan kerja sama lintas sektor yang terus berkembang, Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan siap memperluas peranannya sebagai pusat rujukan nasional pemeriksaan laboratorium kesehatan lingkungan dan uji produk alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga setelah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Salah satu potensi unggulan yang dimiliki Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan sebagai laboratorium kesehatan lingkungan tingkat 5 yang merupakan tingkatan tertinggi dalam sistem laboratorium kesehatan masyarakat di Indonesia. Hal ini mencerminkan kemampuan bahwa Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan mempunyai kemampuan dalam penanganan uji dengan kompleksitas tinggi, kapasitas deteksi dini terhadap risiko lingkungan, serta peran koordinatif dalam pembinaan laboratorium di tingkat regional dan nasional. Didukung kemampuan teknis dalam analisis parameter lingkungan, ketersediaan teknologi laboratorium, dan kapasitas Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan menjadi pusat unggulan dalam menjawab tantangan kesehatan lingkungan saat ini, seperti polusi udara, sanitasi, perubahan iklim, serta penyakit akibat pencemaran lingkungan. Selain itu, peran aktif Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan dalam mendukung program nasional seperti transformasi layanan kesehatan dan penguatan sistem kewaspadaan dini semakin memperkuat posisi institusi sebagai garda terdepan dalam menjaga kualitas lingkungan untuk mendukung derajat kesehatan yang optimal.

### 2. Tantangan

- a. Keterbatasan Sumber Daya Manusia di Bidang Kesehatan
  - 1) Masih kurangnya tenaga ahli di bidang-bidang khusus seperti toksikologi lingkungan, mikrobiologi, analisis kimia dan bioinformatika.
  - 2) Adanya gap antara beban kerja dengan jumlah SDM yang tersedia.
- b. Keterbatasan Anggaran Operasional dan Pengembangan
  - 1) Kebijakan efisiensi belanja berdampak pada pembatasan alokasi anggaran untuk pengadaan peralatan baru, pemeliharaan alat, reagen dan BMHP, serta peningkatan kapasitas SDM.
  - 2) Kebutuhan pengembangan teknologi laboratorium tidak seimbang dengan dukungan pembiayaan yang tersedia.
- c. Kesiapan Bio Safety Level 3 untuk menunjang laboratorium kesehatan masyarakat tingkat 5.

Commented [DA1]: tambahkan tujuan penyusunan RAK



### C. Tujuan Penyusunan Rak 2025-2029

Tujuan penyusunan Rencana Aksi Kegiatan (RAK) 2025–2029 Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan adalah sebagai berikut:

1. Menjabarkan arah kebijakan dan strategi pembangunan kesehatan nasional yang tercantum dalam RPJMN 2025–2029 ke dalam program dan kegiatan operasional di tingkat unit pelaksana teknis.
2. Menyelaraskan peran Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan dengan Rencana Strategis Kementerian Kesehatan 2025–2029 serta kebijakan Direktorat Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas.
3. Menjadi pedoman bagi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi program serta kegiatan laboratorium kesehatan lingkungan secara terukur, sistematis, dan berkesinambungan.
4. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya manusia, anggaran, sarana, dan prasarana laboratorium kesehatan lingkungan dalam mendukung pelayanan kesehatan primer dan komunitas.
5. Memperkuat kontribusi Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan dalam upaya promotif, preventif, pengawasan kualitas lingkungan, serta mitigasi risiko kesehatan masyarakat.
6. Menjamin akuntabilitas kinerja Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan melalui pencapaian indikator kinerja utama yang selaras dengan target nasional.

## BAB II

### VISI, MISI, DAN TUJUAN KEMENTERIAN KESEHATAN

#### A. Visi dan Misi

##### 1. Kementerian Kesehatan

###### a. Visi

Visi Indonesia dalam RPJPN 2025–2045 menuju Indonesia Emas 2045 dijabarkan secara lebih konkret melalui RPJMN 2025–2029 “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”. Sejalan dengan arah visi RPJMN 2025–2029, Kementerian Kesehatan menetapkan visi periode 2025–2029, yakni Masyarakat yang Sehat dan Produktif Guna Mewujudkan Indonesia Emas 2045.

###### b. Misi

Kementerian Kesehatan mengimplementasikan Misi (Asta Cita) Presiden dan Wakil Presiden periode 2025–2029, khususnya pada Asta Cita nomor 4, yaitu “*memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas*”. Asta Cita tersebut diwujudkan dalam RPJMN 2025–2029 sebagai Prioritas Nasional (PN) ke-4. Untuk mendukung PN 4 pada RPJMN serta mencapai Visi Kementerian Kesehatan periode 2025–2029, ditetapkan Misi Kementerian Kesehatan sebagai berikut:

- 1) Mewujudkan masyarakat sehat pada seluruh siklus hidup
- 2) Membudayakan gaya hidup sehat
- 3) Memenuhi layanan kesehatan yang berkualitas, baik, adil, dan terjangkau
- 4) Mengimplementasikan sistem ketahanan kesehatan yang tangguh dan responsive
- 5) Memperkuat tata Kelola dan pendanaan kesehatan nasional yang berkecukupan, adil dan berkelanjutan
- 6) Mengembangkan teknologi kesehatan yang maju
- 7) Mewujudkan birokrasi dan layanan publik yang *agile*, efektif dan efisien

##### 2. Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan

Berdasarkan SK Kepala Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan HK.02.03/IX.1/1393/2024, visi dan misi Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan disusun sebagai arah dan pedoman dalam pelaksanaan tugas serta fungsi organisasi di bidang laboratorium kesehatan lingkungan. Visi ini mencerminkan komitmen dan tekad kuat untuk mewujudkan peran sebagai laboratorium rujukan nasional yang berdaya saing, terpercaya, serta berkontribusi nyata dalam mendukung upaya kesehatan masyarakat.

a. Visi

*"Menjadi Laboratorium Rujukan Nasional yang Unggul dalam Pemeriksaan Vektor, Reservoir, Zoonosis dan Faktor Risiko Lingkungan"*

b. Misi

- 1) Meningkatkan kapasitas pemeriksaan sampel vektor, reservoir, zoonosis dan faktor lingkungan;
- 2) Meningkatkan surveilans vektor, reservoir, dan faktor risiko lingkungan berbasis laboratorium;
- 3) Menjamin mutu pemeriksaan vektor, reservoir, zoonosis dan faktor risiko lingkungan;
- 4) Menciptakan lingkungan kerja yang kondusif bagi SDM untuk berkarya secara profesional.
- 5) Menyelenggarakan bimbingan teknis untuk meningkatkan kompetensi dan kapabilitas profesional di bidang vektor, reservoir, zoonosis dan kesehatan lingkungan.

B. Tujuan Kementerian Kesehatan

Kementerian Kesehatan menetapkan 7 tujuan yang akan dicapai dalam lima tahun ke depan guna mewujudkan visi tersebut, yaitu:

1. Masyarakat sehat di setiap siklus hidup
2. Masyarakat berperilaku hidup sehat
3. Layanan Kesehatan yang berkualitas, baik, adil dan terjangkau
4. Sistem Ketahanan Kesehatan yang tangguh dan responsif
5. Tata Kelola dan Pendanaan Kesehatan yang efektif
6. Teknologi Kesehatan yang Maju
7. Kementerian Kesehatan yang *agile*, efektif, dan efisien

C. Sasaran Strategis Kementerian Kesehatan

Kementerian Kesehatan menetapkan sasaran strategis periode 2025-2029 (terlampir) sebagai upaya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Adapun Sasaran Strategis Kementerian Kesehatan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 1 Sasaran Strategis Kementerian Kesehatan

Tujuan		Sasaran Strategis	
1	Terwujudnya Pelayanan Kesehatan Primer yang Komprehensif dan Berkualitas serta Penguatan Pemberdayaan Masyarakat	1.1	Menguatnya promotif preventif di FKTP melalui UKBM dan pendekatan keluarga
		1.2	Terpenuhinya sarana, prasarana, obat, BMHP, dan alat kesehatan pelayanan kesehatan primer
		1.3	Menguatnya tata kelola manajemen pelayanan dan kolaborasi publik-swasta
2		2.1	Terpenuhinya sarana prasarana, alat kesehatan, obat, dan Bahan Medis Habis

Tujuan		Sasaran Strategis	
	Tersedianya Pelayanan Kesehatan Rujukan yang Berkualitas		Pakai (BMHP) pelayanan kesehatan rujukan
		2.2	Menguatnya tata kelola manajemen dan pelayanan spesialis
		2.3	Menguatnya dan terdistribusinya mutu RS, layanan unggulan, dan pengembangan layanan lain
3	Terciptanya Sistem Ketahanan Kesehatan yang Tangguh	3.1	Menguatnya produksi alat kesehatan, bahan baku obat, obat, obat tradisional, dan vaksin dalam negeri
		3.2	Menguatnya surveilans yang adekuat
		3.3	Menguatnya sistem penanganan bencana dan kedaruratan kesehatan
4	Terciptanya Sistem Pembiayaan Kesehatan yang Efektif, Efisien dan Berkeadilan	4.1	Terpenuhinya pembiayaan kesehatan yang berkeadilan pada kegiatan promotif dan preventif
		4.2	Menguatnya pembiayaan kesehatan nasional secara efektif, efisien dan berkeadilan untuk mencapai <i>Universal Health Coverage</i> (UHC)
5	Terpenuhinya SDM Kesehatan yang Kompeten dan Berkeadilan	5.1	Meningkatnya pemenuhan dan pemerataan SDM kesehatan yang berkualitas
		5.2	Meningkatnya kompetensi dan sistem pendidikan pelatihan SDM kesehatan
		5.3	Meningkatnya sistem pembinaan jabatan fungsional dan karier SDM kesehatan
6	Terbangunnya Tata Kelola, Inovasi, dan Teknologi Kesehatan yang Berkualitas dan Efektif	6.1	Meningkatnya sistem pelayanan kesehatan dalam ekosistem teknologi kesehatan yang terintegrasi dan transparan dalam mendukung kebijakan kesehatan berbasis bukti
		6.2	Meningkatnya kebijakan kesehatan berbasis bukti
		6.3	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik

### BAB III

## Rencana Aksi Program Direktorat Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas

Rencana Aksi Program Direktorat Jenderal (Ditjen) Kesehatan Primer dan Komunitas Tahun 2025- 2029, merupakan penjabaran kebijakan nasional dalam RPJMN 2025-2029, dan Renstra Kementerian Kesehatan 2025 – 2029.

Untuk menjamin relevansi implementasi perencanaan, Ditjen Kesehatan Primer dan Komunitas telah melakukan harmonisasi penjabaran perencanaan dengan tugas pokok dan fungsi yang berikan kepada Ditjen Kesehatan Primer dan Komunitas (Permenkes 21 Tahun 2024).

Untuk Unit Pelaksana Teknis (UPT), penjabaran perencanaan disesuaikan dengan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Hk.01.07/Menkes/155/2024 Tentang Uraian Tugas Dan Fungsi Organisasi Dan Pembentukan Tim Kerja pada Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Direktorat Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas.

#### A. Kebijakan

Dalam rangka mendukung transformasi kesehatan, dan secara khusus transformasi layanan primer, Ditjen Kesehatan Primer dan Komunitas menetapkan kebijakan :

#### **“Penguatan Pelayanan Kesehatan Primer yang Berkualitas dan Terintegrasi Berbasis Siklus Hidup”**

Kebijakan diatas diharapkan dapat mengarahkan Ditjen Kesehatan Primer dan Komunitas untuk mencapai tujuan : Mewujudkan masyarakat sehat melalui penguatan layanan kesehatan primer yang mudah diakses, berorientasi pada pencegahan, serta memberdayakan masyarakat untuk berperilaku hidup sehat di seluruh tahapan usia.

Dalam lima tahun kedepan Ditjen Kesehatan Primer dan Komunitas akan mengembangkan sistem pelayanan kesehatan primer berbasis *Primary Health Care (PHC)* yang berkualitas, promotif, preventif, holistik, dan integratif dengan pendekatan siklus hidup, dimulai dari ibu dan bayi, balita, anak usia sekolah dan remaja, dewasa, hingga lansia yang sehat, aktif, dan mandiri.

#### Arah Kebijakan:

1. Penguatan sistem kesehatan berbasis PHC:
  - a. Menerapkan pendekatan holistik dan integratif dengan memperhatikan tahapan siklus hidup individu dan kebutuhan lokal.
  - b. Mengembangkan sinergi antara fasilitas layanan primer dan masyarakat.
2. Peningkatan literasi dan edukasi:
  - a. Menyediakan edukasi kesehatan yang terstruktur.
  - b. Melaksanakan kampanye kesehatan massal yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

3. Penguatan pelayanan promotif:
  - a. Meningkatkan kapasitas masyarakat dan tenaga kesehatan dalam mendukung gaya hidup sehat.
  - b. Menciptakan lingkungan yang mendukung perilaku hidup bersih dan sehat.
4. Penguatan pelayanan preventif dan detektif:
  - a. Melakukan identifikasi risiko kesehatan sejak dini.
  - b. Mendorong skrining kesehatan berkala dan pencegahan penyakit secara menyeluruh.
5. Peningkatan akses dan tata kelola layanan primer:
  - a. Optimalisasi fungsi Puskesmas dan Unit Pelayanan Kesehatan di Desa/Kelurahan.
  - b. Pengembangan dan peningkatan peran laboratorium kesehatan primer dan komunitas dalam deteksi dan respons penyakit

#### B. Strategi Ditjen Kesehatan Primer dan Komunitas

Dalam rangka memperkuat layanan kesehatan dasar dan meningkatkan derajat kesehatan primer dan komunitas secara menyeluruh, Direktorat Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas menetapkan strategi penguatan layanan kesehatan primer melalui peningkatan akses, kualitas, serta efektivitas layanan. Strategi ini diwujudkan melalui :

1. Memperluas dan meningkatkan akses Masyarakat terhadap fasilitas pelayanan kesehatan primer, seperti pembangunan dan pemerataan Puskesmas, Laboratorium Kesehatan Masyarakat (Labkesmas), pembangunan Unit Pelayanan Kesehatan Desa dan Kelurahan (UPKD/K), disertai dengan pemenuhan sarana, prasarana, dan alat kesehatan yang memadai.
2. Meningkatkan kualitas pelayanan Kesehatan primer. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan primer dilakukan melalui penerapan Integrasi Layanan Primer (ILP), yang menggabungkan berbagai layanan kesehatan dasar secara terpadu dan berkesinambungan, agar lebih mudah diakses dan dimanfaatkan oleh masyarakat. Selain itu, dilakukan standardisasi mutu layanan primer guna memastikan seluruh fasilitas pelayanan kesehatan memberikan layanan yang sesuai standar, merata, dan berorientasi pada keselamatan serta kepuasan pasien.
3. Meningkatkan upaya kesehatan primer dan komunitas berbasis promotif dan preventif. Upaya kesehatan masyarakat berbasis promotif dan preventif menjadi prioritas dalam penguatan layanan kesehatan primer. Strategi ini mencakup penggerakan dan pemberdayaan masyarakat untuk hidup sehat melalui edukasi dan partisipasi aktif. Peran kader kesehatan diperkuat sebagai ujung tombak dalam penyuluhan, deteksi dini, dan pendampingan masyarakat. Selain itu, inovasi dan teknologi digital dimanfaatkan untuk mendukung efektivitas layanan, termasuk dalam pemantauan, edukasi, dan pencatatan kesehatan. Keberhasilan strategi ini juga perlu ditopang oleh kolaborasi antara sektor publik dan swasta, guna memperluas jangkauan serta meningkatkan kualitas layanan promotif dan preventif di tingkat komunitas.

4. Memperkuat Integrasi Jejaring Pelayanan Kesehatan Primer. Integrasi jejaring pelayanan kesehatan primer dilakukan untuk memastikan layanan yang menyeluruh, merata, dan berkesinambungan hingga ke tingkat desa, kelurahan, dan dusun. Strategi ini mencakup penguatan jejaring antara Puskesmas dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) lainnya, seperti klinik serta praktik mandiri dokter dan dokter gigi (PMD/PMDG), guna meningkatkan koordinasi dan efisiensi layanan. Selain itu, pemantauan wilayah setempat diperkuat melalui digitalisasi, termasuk penggunaan dashboard situasi kesehatan perdesaan yang memungkinkan pengambilan keputusan berbasis data dan kondisi riil di lapangan.

#### C. Kerangka Kelembagaan

Dalam rangka pencapaian sasaran dan target Renstra Kementerian Kesehatan 2022-2024, Direktorat Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan primer dan komunitas. secara fungsi, Direktorat Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas menyelenggarakan :

Secara struktur kelembagaan, Direktorat Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Kesehatan. Susunan organisasi Direktorat Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas terdiri atas:

1. Sekretariat Direktorat Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas
2. Direktorat Promosi Kesehatan dan Kesehatan Komunitas
3. Direktorat Pelayanan Kesehatan Keluarga
4. Direktorat Pelayanan Kesehatan Kelompok Rentan
5. Direktorat Tata Kelola Kesehatan Pelayanan Kesehatan Primer
6. Direktorat Fasilitas dan Mutu Pelayanan Kesehatan Primer

#### D. Rencana Program Ditjen Kesprimkom

Bintoro Tjokroaminoto dalam Husaini Usman (2008) menyebutkan, perencanaan adalah proses mempersiapkan kegiatan-kegiatan secara sistematis yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. Prajudi Atmosudirjo dalam Husaini Usman (2008) juga berpendapat bahwa perencanaan adalah perhitungan dan penentuan tentang sesuatu yang akan dijalankan dalam rangka mencapai tujuan tertentu, siapa yang melakukan, bilamana, di mana, dan bagaimana cara melakukannya.

Berdasarkan Renstra Kementerian Kesehatan Tahun 2025- 2029, program di Ditjen Kesehatan Primer dan Komunitas mendukung tiga tujuan Kementerian Kesehatan meliputi (1) Masyarakat sehat di setiap siklus hidup, (2) Masyarakat berperilaku hidup sehat, dan (3) Layanan kesehatan yang berkualitas, baik, adil, dan terjangkau. Untuk mencapai tujuan tersebut, sasaran strategis dan sasaran program disusun beserta indikator kinerja untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan program di Kementerian Kesehatan.

Tabel 2 Misi, Sasaran Strategis (dan Indikator Sasaran Strategis)  
yang didukung oleh Ditjen Kesehatan Primer dan Komunitas

Misi	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis
1 Masyarakat sehat di setiap siklus hidup	1.1 Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan Promotif dan Preventif	ISS 1 Angka Kematian Ibu
		ISS 2. Angka Kematian Balita
		ISS 3. Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek)
		ISS 4. Angka harapan hidup sehat pada umur 60 tahun (HALE60)
		ISS 5 Cakupan penerima pemeriksaan kesehatan gratis
		ISS 6. Prevalensi Depresi di umur ≥ 15 tahun
2 Masyarakat berperilaku hidup sehat	2.1 Meningkatnya kualitas budaya hidup sehat masyarakat	ISS 10 Persentase Penduduk dengan Literasi Kesehatan
		ISS 11 Proporsi penduduk dengan aktivitas fisik cukup
3 Layanan Kesehatan yang berkualitas, baik, adil dan terjangkau	3.1 Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan primer, lanjutan dan labkes	ISS 14 Persentase kabupaten/kota dengan Fasilitas Kesehatan sesuai standar
		ISS 16 Persentase fasilitas pelayanan kesehatan mencapai akreditasi paripurna
		ISS 17 Tingkat kepuasan pasien di fasilitas kesehatan

Tabel 3 Tabel Sasaran Program (termasuk Indikator Kinerja Program (IKP))  
Ditjen Kesehatan Primer dan Komunitas dan keterkaitannya terhadap  
sasaran strategis Kementerian Kesehatan

Sasaran Strategis	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program
1.1 Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan Promotif dan Preventif	1.1 Meningkatnya kualitas layanan kesehatan ibu, anak, usia dewasa dan lansia	IKP 1.1. Persentase Anemia pada ibu hamil
		IKP 1.2. Cakupan kunjungan nifas (KF) lengkap sesuai standar
		IKP 1.3. Persentase ibu hamil mendapatkan skrining preeklampsia
		IKP 2.1. Angka Kematian Neonatal
		IKP 2.2. Angka Kematian Bayi
		IKP 3.1. Prevalensi wasting (Gizi Kurang dan Gizi Buruk) pada balita
		IKP 3.2 Insiden stunting balita (kasus baru)
		IKP 3.3 Persentase bayi usia 6 bulan mendapat ASI eksklusif
		IKP 3.4 Persentase anak usia 6 - 23 bulan mendapat MPASI
		IKP 3.5 Persentase Ibu hamil Kurang Energi Kronis (KEK)



Sasaran Strategis	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program
1.1 Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan Promotif dan Preventif	1.1 Meningkatnya kualitas layanan kesehatan ibu, anak, usia dewasa dan lansia	IKP 4.1 Persentase lanjut usia yang mandiri
		IKP 4.2 Persentase pekerja mendapatkan pelayanan kesehatan kerja
	1.14 Meningkatnya cakupan Pemeriksaan Kesehatan Gratis	IKP 5.1 Persentase kab/kota dengan cakupan Pemeriksaan Kesehatan Gratis >80%
	1.4 Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan Jiwa	IKP 6.1 Persentase depresi yang mendapatkan layanan
		IKP 6.2 Persentase ODGJ berat yang mendapatkan layanan
		IKP 6.3 Persentase perempuan dan anak korban kekerasan mendapat pelayanan kesehatan
		IKP 6.4 Jumlah Kab/Kota tersertifikasi bebas pasung
		IKP 6.6 Jumlah orang yang menjadi first aider Pertolongan Pertama pada Luka Psikologis (P3LP)
	xx-Meningkatnya jumlah penyalahguna napza yang mendapatkan rehabilitasi medis	IKP 6.5 Persentase orang dengan gangguan penggunaan NAPZA yang mendapatkan layanan rehabilitasi medis di fasyankes IPWL
2.1 Meningkatnya kualitas budaya hidup sehat masyarakat	1.15 Meningkatnya masyarakat yang berperilaku hidup sehat	IKP 10.1 Persentase Penduduk yang Menerapkan Perilaku Hidup Sehat
		IKP 11.1 Persentase kabupaten/ kota yang menggerakkan masyarakat melakukan aktivitas fisik
3.1 Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan primer, lanjutan dan labkes	1.17 Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan primer	IKP 14.3 Persentase Puskesmas yang memenuhi standar akses
		IKP 14.4 Persentase fasilitas kesehatan yang memenuhi standar penyandang disabilitas
		IKP 14.4 Persentase laboratorium kesehatan masyarakat tingkat 2-5 yang dikembangkan sesuai standar berdasarkan stratanya
		IKP 14.6 Persentase Kab/Kota yang memiliki minimal 90% Puskesmas sesuai standar SPA

Sasaran Strategis	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program
3.1 Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan primer, lanjutan dan labkes	1.17 Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan primer	IKP 16.1 Persentase Labkesmas yang terakreditasi
		IKP 16.2. Persentase Puskesmas terakreditasi paripurna
		IKP 17.1 Tingkat kepuasan pasien di fasilitas kesehatan primer

#### E. Kerangka Logis Program Kesehatan primer dan komunitas

Kerangka logis program kesehatan primer dan komunitas menggunakan pendekatan *logic model*. Kerangka logis ditampilkan dalam bentuk kerangka logis berdasarkan sasaran dan pohon kinerja (indikator) Ditjen Kesehatan Primer dan Komunitas yang ditampilkan dalam bentuk tabel (terlampir).

## BAB IV

### Rencana Aksi Kegiatan

#### Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan

Penyusunan Rencana Aksi Program di lingkungan Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan (Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan) mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 serta Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2025–2029. Pelaksanaan program diselenggarakan dengan tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Kementerian Kesehatan. Uraian tugas, fungsi organisasi, dan pembentukan tim kerja pada Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan diatur dalam Keputusan Kepala Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan Nomor HK.02.05/IX.1/46/2025. Seluruh dasar hukum tersebut menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan dan pencapaian target program kesehatan masyarakat oleh Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan yang merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bawah Direktorat Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas.

#### A. Kerangka Kelembagaan

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan nomor 27 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan bahwa Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan laboratorium kesehatan lingkungan. Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan juga mendukung pelaksanaan tugas dari unit organisasi jabatan pimpinan tinggi madya yang berkesesuaian di lingkungan Kementerian Kesehatan setelah mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal.

Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas. Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan secara administratif dikoordinasikan dan dibina oleh Sekretaris Direktorat Jenderal dan secara teknis fungsional dibina oleh Direktur Tata Kelola Pelayanan Kesehatan Primer. Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 27 Tahun 2023 menyelenggarakan fungsi:

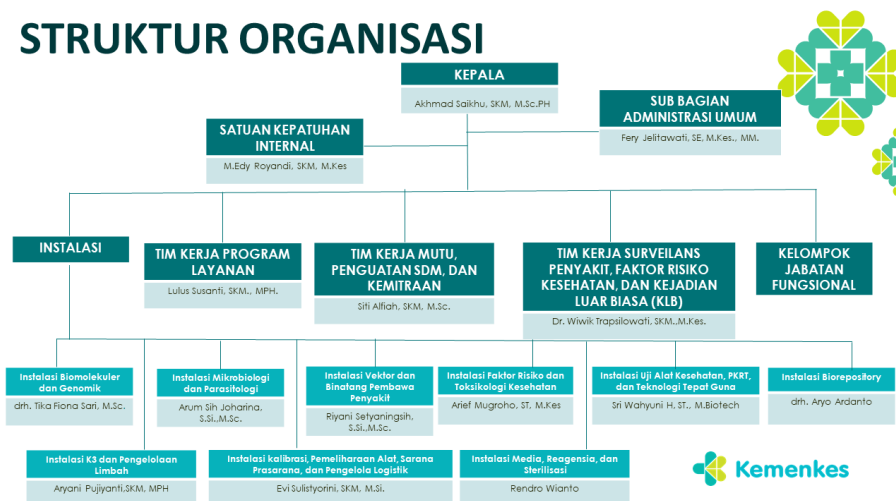
1. Penyusunan rencana, program, dan anggaran;
2. Pelaksanaan pemeriksaan laboratorium vektor, reservoir, zoonosis, dan kesehatan lingkungan;
3. Pelaksanaan surveilans kesehatan berbasis laboratorium vektor, reservoir, zoonosis, dan kesehatan lingkungan;
4. Analisis masalah kesehatan masyarakat berbasis laboratorium vektor, reservoir, zoonosis, dan kesehatan lingkungan;
5. Pelaksanaan pemodelan intervensi dan/atau teknologi tepat guna di bidang laboratorium vektor, reservoir, zoonosis, dan kesehatan lingkungan;

6. Pelaksanaan penilaian dan respon cepat, dan kewaspadaan dini untuk penanggulangan kejadian luar biasa/wabah atau bencana lainnya berbasis laboratorium vektor, reservoir, zoonosis, dan kesehatan lingkungan;
7. Pelaksanaan penjaminan mutu laboratorium vektor, reservoir, zoonosis, dan kesehatan lingkungan;
8. Pelaksanaan sistem rujukan laboratorium vektor, reservoir, zoonosis, dan kesehatan lingkungan;
9. Pelaksanaan pengelolaan reagen dan logistik di bidang laboratorium vektor, reservoir, zoonosis, dan kesehatan lingkungan;
10. Pelaksanaan koordinasi pengelolaan biorepositori;
11. Pelaksanaan respon terhadap risiko nuklir, biologi, dan kimia di bidang laboratorium vektor, reservoir, zoonosis, dan kesehatan lingkungan;
12. Pelaksanaan bimbingan teknis;
13. Pelaksanaan jejaring kerja dan kemitraan;
14. Pengelolaan data dan informasi;
15. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
16. Pelaksanaan urusan administrasi.

Selain menyelenggarakan fungsi tersebut di atas, Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan juga menyelenggarakan fungsi:

1. Rujukan nasional pemeriksaan laboratorium kesehatan lingkungan; dan
2. Uji produk alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga setelah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## STRUKTUR ORGANISASI



Gambar 1 Struktur Organisasi Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan

## B. Kerangka Logis

Sebagai instansi vertikal di bawah Kementerian Kesehatan, Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan memiliki tanggung jawab untuk mendukung pencapaian sasaran strategis yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan. Untuk memastikan keselarasan ini, indikator kinerja kegiatan di Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan diuraikan dan diselaraskan dengan Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Kegiatan melalui proses cascading.

Hasil program Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan dinyatakan berhasil apabila Indikator Kinerja Kegiatan yang telah ditetapkan beserta targetnya dapat tercapai. Adapun penetapan IKK dan target mengacu pada kriteria SMART (*Specific, Measurable, Achievable, Relevant* dan *Timebound*). Metode ini dipilih agar semua kegiatan dapat terlaksana sesuai dengan hasil yang diharapkan.

1. *Specific*, spesifik artinya target harus disusun dengan jelas, terinci, dapat dibedakan dari yang lain dan tidak berdwimakna.
2. *Measurable*, terukur artinya dapat diukur, dapat diidentifikasi satuan atau parameter keberhasilannya.
3. *Achievable*, dapat dilaksanakan atau dicapai artinya secara empirik dapat dilaksanakan atau dioperasionalkan, relevan dengan tugas dan fungsinya dan dalam kendali.
4. *Relevance*: terkait langsung dengan (mempresentasikan) apa yang diukur.
5. *Timebound*, serta memperhatikan fungsi waktu artinya pencapaian target memiliki jadwal dan kurun waktu yang jelas.

Berikut adalah analisis SMART (*Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound*) berdasarkan target Indikator Kinerja Kegiatan Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan Tahun 2025.

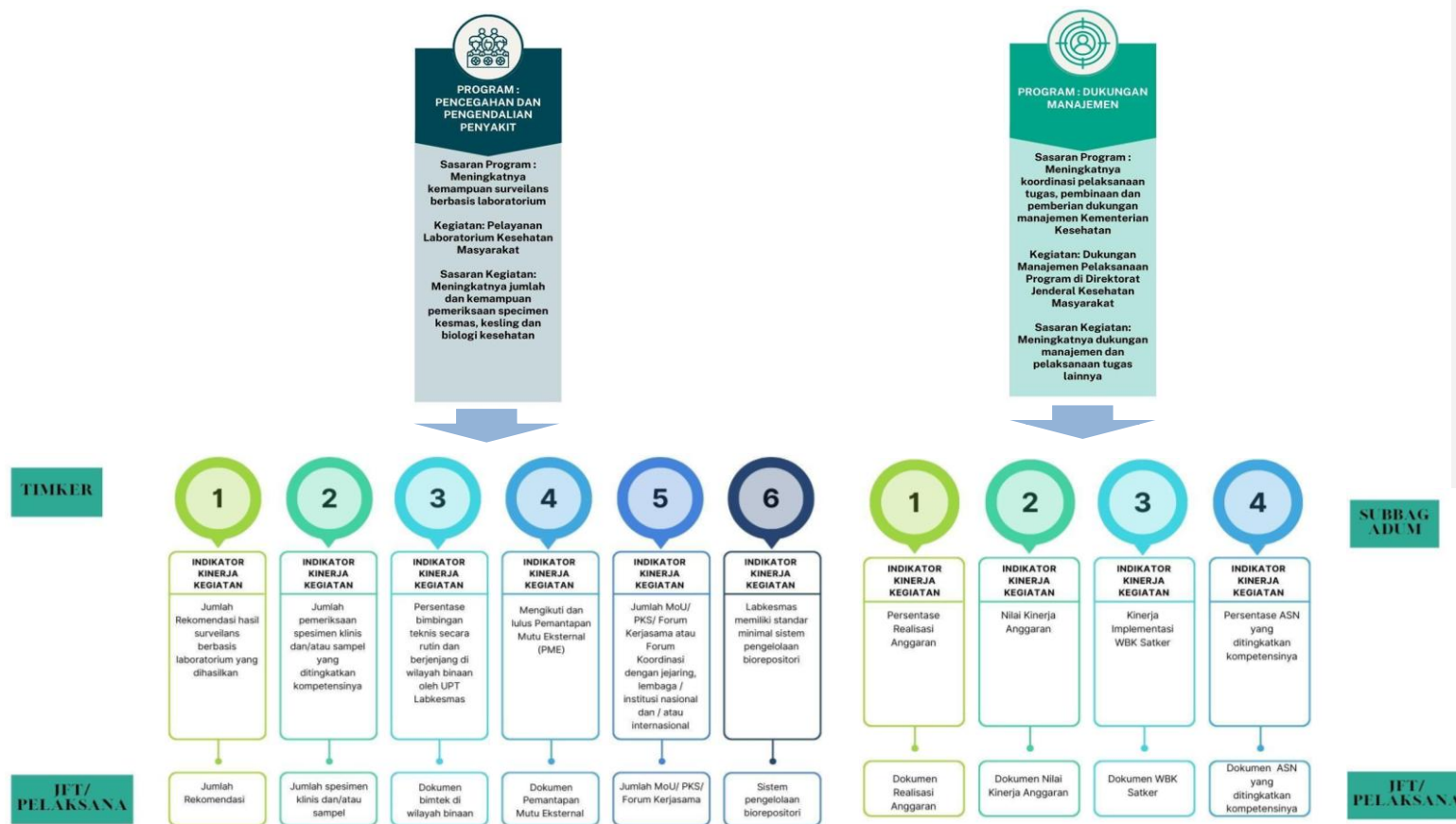
Tabel 4 Analisis SMART Indikator Kinerja Kegiatan  
Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan Tahun 2024

Target	Specific	Measurable	Achievable	Relevant	Time-bound
Jumlah Rekomendasi hasil surveilans berbasis laboratorium yang dihasilkan	Menyusun 12 rekomendasi hasil surveilans berbasis laboratorium	12 rekomendasi	Target ini dapat dicapai dengan melakukan surveilans berbasis laboratorium yang komprehensif dan analisis data yang tepat	Penting untuk meningkatkan kualitas layanan dan hasil laboratorium dalam kesehatan lingkungan	Hingga akhir tahun
Jumlah pemeriksaan spesimen klinis	Melakukan pemeriksaan terhadap 10.000 spesimen	10.000 spesimen	Dengan alokasi sumber daya yang tepat dan efisiensi	Penting untuk menyediakan data yang akurat dan	Hingga akhir tahun

Target	Specific	Measurable	Achievable	Relevant	Time-bound
dan/atau sampel	klinis dan/atau sampel		waktu, target ini dapat tercapai	komprehensif untuk diagnosis dan pemantauan kesehatan	
Persentase bimbingan teknis secara rutin dan berjenjang di wilayah binaan oleh UPT Labkesmas	Melaksanakan bimbingan teknis secara rutin dan berjenjang di seluruh wilayah binaan	100% dari wilayah binaan mendapatkan bimbingan teknis secara rutin dan berjenjang	Achievable dengan perencanaan yang matang dan koordinasi dengan wilayah binaan	Penting untuk memastikan kualitas dan standar pelayanan kesehatan di seluruh wilayah binaan	Hingga akhir tahun
Mengikuti dan lulus Pemantapan Mutu Eksternal (PME)	Mengikuti dan lulus dalam 2 kali Pemantapan Mutu Eksternal (PME)	2 kali mengikuti dan lulus PME	Target ini dapat dicapai dengan mempersiapkan laboratorium sesuai standar mutu yang ditetapkan dan pelatihan yang memadai	Penting untuk menjaga dan meningkatkan kualitas hasil laboratorium sesuai standar nasional atau internasional	Hingga akhir tahun
Jumlah MoU/PKS/Forum Kerjasama atau Forum Koordinasi dengan jejaring, lembaga/institusi nasional dan/atau internasional	Membuat 5 MoU/PKS atau laporan kerjasama dengan jejaring, lembaga/institusi nasional dan/atau internasional	5 MoU/PKS atau laporan kerjasama	Dapat dicapai melalui kolaborasi yang efektif dengan berbagai lembaga atau institusi terkait	Penting untuk memperluas jaringan kerjasama dan dukungan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan kesehatan lingkungan	Hingga akhir tahun
Labkesmas memiliki standar minimal sistem pengelolaan biorepositori	Menerapkan standar minimal sistem pengelolaan biorepositori di laboratorium	100% penerapan standar minimal sistem pengelolaan biorepositori	Achievable dengan penyesuaian terhadap standar yang berlaku dan pelatihan staf yang memadai	Penting untuk memastikan pengelolaan biorepositori yang efektif dan sesuai standar nasional atau internasional	Hingga akhir tahun
Persentase Realisasi Anggaran	Mencapai 96% dari total anggaran yang telah dialokasikan	96% realisasi anggaran	Dapat dicapai dengan perencanaan anggaran yang efektif dan pengawasan	Penting untuk memastikan penggunaan anggaran yang efisien	Hingga akhir tahun

Target	Specific	Measurable	Achievable	Relevant	Time-bound
			pelaksanaan anggaran secara rutin	dan tepat sasaran	
Nilai Kinerja Anggaran (NKA)	Mendapatkan nilai kinerja anggaran sebesar 95 NKA	95 NKA	Target ini dapat dicapai melalui pengelolaan anggaran yang optimal dan akuntabilitas dalam setiap tahap pelaksanaannya	Penting untuk menilai efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran sesuai dengan peraturan yang berlaku	Hingga akhir tahun
Kinerja Implementasi WBK Satker	Mencapai kinerja implementasi WBK (Wilayah Bebas dari Korupsi) Satker dengan skor 75 pada skala pengukuran	Skor 75	Dapat dicapai melalui implementasi program dan kebijakan anti-korupsi yang efektif di Satker	Penting untuk menciptakan lingkungan kerja yang bebas dari korupsi dan meningkatkan kepercayaan publik	Hingga akhir tahun
Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	Meningkatkan kompetensi 80% dari ASN (Aparatur Sipil Negara) melalui pelatihan, workshop, atau program pengembangan lainnya	80% ASN dengan peningkatan kompetensi	Dapat dicapai dengan penyediaan program pelatihan yang relevan dan akses yang memadai bagi ASN untuk mengikuti pelatihan	Penting untuk meningkatkan kinerja individu dan organisasi melalui peningkatan kompetensi ASN	Hingga akhir tahun

Di bawah ini adalah gambaran cascading kinerja yang dilaksanakan oleh Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan dalam mencapai indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja.



Gambar 2 Cascading Kinerja Kegiatan Teknis  
Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan Tahun 2024

Commented [DA2]: Ganti ke cascading satunya sama dg RKR 2020-2024



### C. Rencana Kegiatan

Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan (Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan) berperan sebagai unit pelaksana teknis di bawah Direktorat Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas, Kementerian Kesehatan yang mendukung pencapaian sasaran pembangunan kesehatan masyarakat melalui pelayanan laboratorium kesehatan masyarakat serta dukungan manajemen. Rencana kegiatan yang akan dilaksanakan untuk periode 2025–2029, adalah sebagai berikut:

1. **Kegiatan Pelayanan Laboratorium Kesehatan Masyarakat**
  - a. Penguatan surveilans berbasis laboratorium melalui penyusunan minimal 12 rekomendasi hasil surveilans yang dapat digunakan dalam pengambilan kebijakan kesehatan.
  - b. Peningkatan jumlah dan kualitas pemeriksaan spesimen kesehatan masyarakat, kesehatan lingkungan dengan menargetkan 10.000 spesimen klinis dan/atau sampel per tahun.
  - c. Pelaksanaan bimbingan teknis secara rutin dan berjenjang kepada laboratorium jejaring di wilayah binaan dengan target 100 persen.
  - d. Partisipasi dalam program pemantapan mutu eksternal (PME) sebanyak 2 (dua) kali setahun untuk menjamin kualitas hasil pemeriksaan.
  - e. Pengembangan jejaring dan kerja sama nasional maupun internasional, ditargetkan 5 (lima) bentuk kerja sama melalui MoU, PKS, forum koordinasi, maupun laporan kerja sama.
  - f. Penerapan standar minimal sistem pengelolaan biorepositori hingga mencapai 100 persen guna mendukung penyimpanan spesimen sesuai standar internasional (ISBER Best Practices: Recommendation for Repositories, 5th ed).
2. Kegiatan Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program
  - a. Peningkatan efektivitas pengelolaan anggaran dengan target realisasi sebesar 96 persen dan pencapaian nilai kinerja anggaran sebesar 80,1 NKA.
  - b. Penguatan tata kelola organisasi menuju zona integritas dengan target implementasi WBK satker 75 skala.
  - c. Peningkatan kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui pelatihan, bimbingan teknis, dan pengembangan kapasitas dengan target minimal 80 persen ASN memperoleh peningkatan kompetensi.
3. Strategi Pelaksanaan
  - a. Optimalisasi pemanfaatan sumber daya laboratorium dan penguatan kapasitas SDM.
  - b. Pengembangan kerja sama dan jejaring laboratorium lintas sektoral.
  - c. Peningkatan kualitas layanan laboratorium melalui akreditasi dan standardisasi sesuai ketentuan nasional maupun internasional.
  - d. Pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung digitalisasi pelayanan, sistem mutu, serta monitoring dan evaluasi kinerja.

Commented [DA3]: Urutkan sesuai yg di PK

Commented [DA4]: Konfirm ke Mas Aryo

## BAB V

### TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

#### A. Target Kinerja

Target kinerja Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan tahun 2025-2029 disusun untuk mendukung pencapaian sasaran strategis Kementerian Kesehatan dalam mewujudkan masyarakat yang sehat dan produktif. Target tersebut ditetapkan berdasarkan indikator kinerja kegiatan (IKK) yang mencakup dua lingkup utama, yaitu kegiatan pelayanan laboratorium kesehatan masyarakat serta kegiatan dukungan manajemen pelaksanaan program di Direktorat Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas. Melalui indikator kinerja tersebut, Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan laboratorium, memperkuat jejaring dan kerja sama, mengoptimalkan tata kelola organisasi dan sumber daya. Adapun target kinerja Balai Besar Laboratorium Kesehatan Tahun 2025-2029 tersaji pada tabel di bawah ini:

Tabel 5 Target Kinerja Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan Tahun 2025

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
<b>A. Kegiatan Pelayanan Laboratorium Kesehatan Masyarakat</b>		
Meningkatnya jumlah dan kemampuan pemeriksaan specimen kesmas, kesling dan biologi kesehatan	1. Jumlah Rekomendasi hasil surveilans berbasis laboratorium yang dihasilkan	12 Rekomendasi
	2. Jumlah pemeriksaan spesimen klinis dan/atau sampel	10.000 spesimen klinis dan/atau sampel
	3. Persentase bimbingan teknis secara rutin dan berjenjang di wilayah binaan oleh UPT Labkesmas	100 %
	4. Mengikuti dan lulus Pemantapan Mutu Eksternal (PME)	2 kali
	5. Jumlah MoU/ PKS/ Forum Kerjasama atau Forum Koordinasi dengan jejaring, lembaga / institusi nasional dan / atau internasional	5 MoU/PKS/ Laporan
	6. Labkesmas memiliki standar minimal sistem pengelolaan biorepositori	100%

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
B. Kegiatan Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Ditjen Kesehatan Masyarakat		
Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya	1. Persentase Realisasi Anggaran	96%
	2. Nilai Kinerja Anggaran	80,1 NKA
	3. Kinerja Implementasi WBK Satker	75 Skala
	4. Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	80%

#### B. Kerangka Pendanaan

Sumber pendanaan kegiatan Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan pada periode 2025–2029 berasal dari anggaran rupiah murni dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Pendanaan melalui rupiah murni dialokasikan untuk mendukung penyelenggaraan program prioritas pemerintah, termasuk kegiatan pelayanan laboratorium kesehatan masyarakat serta dukungan manajemen pelaksanaan program. Pendanaan dari PNBP diperoleh melalui jasa pelayanan laboratorium yang diberikan kepada masyarakat, swasta/dunia usaha, akademisi, instansi pemerintah dan media, yang digunakan kembali untuk meningkatkan mutu layanan.

#### C. Analisis Indikator Kinerja Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan

Berikut adalah analisis indikator kinerja yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 27 Tahun 2023:

Tabel 6 Analisis Indikator Kinerja Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan

Indikator Kinerja	Keterkaitan dengan Fungsi	Analisis
Jumlah Rekomendasi hasil surveilans berbasis laboratorium yang dihasilkan: 12 Rekomendasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelaksanaan surveilans kesehatan berbasis laboratorium vektor, reservoir, zoonosis, dan kesehatan lingkungan.</li> <li>- Analisis masalah kesehatan masyarakat berbasis laboratorium vektor, reservoir, zoonosis, dan kesehatan lingkungan.</li> </ul>	Jumlah rekomendasi yang dihasilkan menunjukkan efektivitas surveilans berbasis laboratorium serta kemampuan dalam menganalisis data untuk memberikan rekomendasi yang tepat. Hal ini sejalan dengan fungsi analisis dan surveilans yang menjadi tugas pokok Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan

Indikator Kinerja	Keterkaitan dengan Fungsi	Analisis
Jumlah pemeriksaan spesimen klinis dan/atau sampel: 10.000 spesimen	Pelaksanaan pemeriksaan laboratorium vektor, reservoir, zoonosis, dan kesehatan lingkungan	Jumlah pemeriksaan spesimen menunjukkan kapasitas dan kualitas laboratorium dalam melakukan pemeriksaan yang dibutuhkan untuk analisis kesehatan lingkungan serta deteksi dini terhadap penyakit vektor, reservoir dan zoonosis.
Persentase bimbingan teknis secara rutin dan berjenjang di wilayah binaan oleh UPT Labkesmas: 100%	Pelaksanaan bimbingan teknis.	Persentase bimbingan teknis mencerminkan komitmen Balai dalam meningkatkan kompetensi dan pengetahuan di wilayah binaan. Pelaksanaan yang konsisten dan merata memastikan peningkatan kualitas layanan kesehatan lingkungan di berbagai wilayah
Mengikuti dan lulus Pemantapan Mutu Eksternal (PME): 2 kali	Pelaksanaan penjaminan mutu laboratorium vektor, reservoir, zoonosis, dan kesehatan lingkungan	Keikutsertaan dan kelulusan dalam PME menunjukkan komitmen Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan terhadap kualitas dan akurasi hasil laboratorium sesuai dengan standar nasional maupun internasional. Hal ini penting untuk menjaga integritas, kualitas dan kepercayaan hasil laboratorium
Jumlah MoU/PKS/Forum Kerjasama atau Forum Koordinasi dengan jejaring, lembaga/institusi nasional dan/atau internasional: 5 MoU/PKS/Laporan	Pelaksanaan jejaring kerja dan kemitraan.	Jumlah MoU/PKS atau forum kerjasama yang berhasil dibentuk menunjukkan kemampuan Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan dalam memperluas jejaring dan kerjasama strategis, baik secara nasional maupun

Indikator Kinerja	Keterkaitan dengan Fungsi	Analisis
		internasional, untuk mendukung tugas pokok dan fungsi laboratorium kesehatan lingkungan
Labkesmas memiliki standar minimal sistem pengelolaan biorepositori: 100%	Pelaksanaan koordinasi pengelolaan biorepositori	Standar minimal sistem pengelolaan biorepositori memastikan bahwa Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan memiliki kapasitas untuk menyimpan dan mengelola sampel biologi secara aman dan sesuai standar. Hal ini penting untuk pemeriksaan dan pengujian di bidang kesehatan lingkungan
Persentase Realisasi Anggaran	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyusunan rencana, program, dan anggaran.</li> <li>- Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.</li> <li>- Pelaksanaan urusan administrasi.</li> </ul>	Anggaran yang terealisasi menunjukkan efisiensi dan efektivitas dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran. Hal ini penting untuk memastikan bahwa semua program dan kegiatan yang direncanakan dapat dijalankan sesuai dengan alokasi anggaran yang telah ditetapkan.
Nilai Kinerja Anggaran (NKA)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyusunan rencana, program, dan anggaran.</li> <li>- Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.</li> </ul>	Nilai Kinerja Anggaran merupakan ukuran komprehensif yang mencerminkan kualitas pengelolaan anggaran oleh Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan. Tingginya nilai ini menunjukkan bahwa anggaran digunakan secara optimal untuk mendukung fungsi-fungsi esensial yang dilaksanakan oleh Balai

Indikator Kinerja	Keterkaitan dengan Fungsi	Analisis
Kinerja Implementasi WBK Satker	Pelaksanaan urusan administrasi.	Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan Implementasi Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) adalah indikator penting dalam menciptakan tata kelola yang baik dan transparan. Tingginya nilai WBK menunjukkan bahwa Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan mampu menjalankan fungsi-fungsinya tanpa terlibat dalam praktik korupsi, kolusi dan nepotisme, yang dapat meningkatkan kepercayaan publik
Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelaksanaan bimbingan teknis.</li> <li>- Pelaksanaan urusan administrasi.</li> </ul>	Pelaksanaan Peningkatan kompetensi ASN melalui pengembangan dan kompetensi, memastikan bahwa pegawai memiliki keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi secara efektif dan untuk pengembangan institusi

Indikator kinerja yang diberikan sejalan dengan tugas pokok dan fungsi Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan. Setiap indikator memberikan gambaran tentang efektivitas pelaksanaan tugas, baik dalam penguatan surveilans, pemeriksaan laboratorium, penjaminan mutu, bimbingan teknis, jejaring kerjasama, maupun pengelolaan biorepositori. Implementasi yang baik dari indikator kinerja ini mendukung pencapaian tujuan strategis Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan.

#### D. Analisis Indikator Kinerja Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan Berdasarkan Kriteria Achievable, Menantang dan Realistik

Berikut adalah analisis terhadap Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan berdasarkan Peraturan Menteri

Kesehatan Nomor 27 Tahun 2023. Analisis ini mengevaluasi pencapaian target IKK dengan mempertimbangkan tiga kriteria utama: *achievable* (dapat dicapai), *menantang* (menuntut upaya ekstra), dan *realistis* (sesuai dengan kapasitas dan sumber daya yang ada). Setiap indikator dievaluasi untuk menentukan sejauh mana target tersebut dapat dicapai secara efektif dan efisien, sekaligus tantangan untuk mendorong peningkatan kinerja dan kualitas pelayanan. Analisis ini bertujuan untuk memastikan bahwa target yang ditetapkan sejalan dengan tugas pokok dan fungsi Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan serta mendukung pencapaian tujuan strategis Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan.

Tabel 7 Analisis Indikator Kinerja Kegiatan Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan Berdasarkan Kriteria *Achievable*, Menantang dan Realistis

IKK	<i>Achievable</i>	Menantang	Realistis
1. Jumlah Rekomendasi hasil surveilans berbasis laboratorium yang dihasilkan	Dapat dicapai dengan adanya data dan analisis yang memadai dari surveilans berbasis laboratorium	Menyusun rekomendasi yang tepat dan relevan dengan situasi terkini, memerlukan koordinasi intensif dengan berbagai pihak	Target ini realistis karena Balai memiliki sumber daya dan kapasitas untuk melakukan surveilans dan menyusun rekomendasi
2. Jumlah pemeriksaan spesimen klinis dan/atau sampel	Dengan sumber daya yang ada, jumlah target spesimen dapat dicapai melalui optimalisasi proses kerja laboratorium	Menantang karena perlu mempertahankan kualitas pemeriksaan yang tinggi meskipun volume pekerjaan besar	Realistis dengan adanya infrastruktur laboratorium yang memadai dan tim yang kompeten
3. Persentase bimbingan teknis secara rutin dan berjenjang di wilayah binaan oleh UPT Labkesmas	Dapat dicapai dengan perencanaan dan jadwal bimbingan yang sistematis dan dukungan manajemen yang baik	Menantang karena membutuhkan konsistensi dalam pelaksanaan dan penyesuaian dengan kebutuhan wilayah binaan yang beragam	Realistis mengingat pentingnya bimbingan teknis dalam menjaga standar layanan di wilayah binaan
4. Mengikuti dan lulus Pemantapan Mutu Eksternal (PME)	Dapat dicapai dengan persiapan yang matang dan kepatuhan terhadap standar mutu yang ditetapkan	Menantang karena harus memastikan seluruh aspek mutu laboratorium memenuhi kriteria PME	Realistis mengingat Balai telah berpengalaman dalam mengikuti program mutu eksternal sebelumnya
5. Jumlah MoU/ PKS/ Forum Kerjasama atau Forum Koordinasi dengan jejaring, lembaga/institusi nasional	Dapat dicapai melalui inisiatif proaktif dalam membangun jaringan dan kerjasama yang relevan	Menantang karena membutuhkan upaya negosiasi dan koordinasi lintas lembaga yang tidak selalu mudah.	Realistis mengingat pentingnya jejaring kerjasama dalam mendukung tugas pokok dan fungsi Balai

IKK	<i>Achievable</i>	Menantang	Realistis
dan/atau internasional			
6. Labkesmas memiliki standar minimal sistem pengelolaan biorepositori	Dapat dicapai dengan mengikuti panduan dan regulasi yang ada, serta mengadopsi praktik terbaik dalam pengelolaan biorepositori	Menantang karena harus menjaga integritas sampel biologi dalam jangka waktu yang panjang sesuai standar internasional	Realistis karena Balai memiliki tanggung jawab untuk memastikan pengelolaan biorepositori sesuai dengan standar yang ditetapkan
7. Persentase Realisasi Anggaran	Dapat dicapai dengan perencanaan anggaran yang cermat dan pemantauan rutin terhadap penggunaan anggaran	Menantang karena harus memastikan bahwa semua program berjalan sesuai rencana dan anggaran digunakan secara optimal.	Realistis dengan adanya sistem pengelolaan keuangan yang baik dan transparan
8. Nilai Kinerja Anggaran (NKA)	Dapat dicapai dengan pelaksanaan anggaran yang efektif dan efisien serta akuntabilitas yang tinggi.	Menantang karena harus mencapai nilai yang mendekati sempurna, yang memerlukan perencanaan dan pelaksanaan yang teliti	Realistis dengan adanya komitmen untuk terus meningkatkan kinerja pengelolaan anggaran
9. Kinerja Implementasi WBK Satker	Dapat dicapai melalui penerapan kebijakan anti-korupsi yang konsisten dan budaya kerja yang transparan.	Menantang karena membutuhkan perubahan budaya kerja dan implementasi sistem yang ketat untuk memastikan WBK tercapai	Realistis mengingat WBK adalah bagian dari upaya reformasi birokrasi yang telah menjadi fokus utama di instansi pemerintah
10. Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	Dapat dicapai dengan program pelatihan yang terstruktur dan sesuai kebutuhan peningkatan kompetensi ASN	Menantang karena harus memastikan bahwa pelatihan yang diberikan benar-benar efektif dan meningkatkan kinerja ASN	Realistis karena peningkatan kompetensi ASN adalah bagian integral dari pengembangan SDM di instansi pemerintah

Analisis ini menunjukkan bahwa target yang ditetapkan cukup *achievable* dengan upaya yang tepat, *menantang* karena memerlukan dedikasi dan upaya ekstra untuk mencapainya, namun tetap *realistis* dalam konteks kapasitas dan sumber daya yang dimiliki oleh Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan. Setiap indikator kinerja ini memiliki peran penting dalam mendukung pencapaian tujuan strategis institusi, yang mencerminkan komitmen terhadap kualitas, akuntabilitas, dan efektivitas dalam menjalankan tugas-tugasnya.



## BAB VI

### PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PENGENDALIAN

Berdasarkan PP Nomor 60 Tahun 2008, pemantauan dan evaluasi merupakan salah satu unsur dalam Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Pemantauan tersebut tidak hanya dilakukan pada tahap pelaksanaan, tetapi juga sejak proses perencanaan. Untuk menjamin tercapainya target dan sasaran yang telah ditetapkan Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan, pemantauan dan evaluasi terhadap rencana aksi dilaksanakan melalui sistem informasi yang terintegrasi.

#### A. Pemantauan

Mekanisme pemantauan disusun untuk mendukung pelaksanaan Rencana Aksi Kegiatan dan menjadi bagian dari siklus penyusunan serta pemutakhiran rencana sesuai perkembangan terbaru. Pemantauan diperlukan untuk memastikan tujuan dan sasaran dapat tercapai, serta kegiatan berjalan sesuai rencana. Apabila terjadi penyimpangan, seperti target tidak tercapai, target melebihi capaian, atau adanya perubahan sasaran, hal tersebut dapat segera terdeteksi sehingga langkah perbaikan dapat dilakukan. Pemantauan berfungsi menilai sejauh mana efektivitas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan, sekaligus menganalisis faktor penyebab keberhasilan maupun ketidaktercapaian sasaran.

Manfaat utama pemantauan adalah mengetahui perkembangan kegiatan (laporan kemajuan), menjadi alat pengendalian, serta memberikan peringatan dini terhadap potensi masalah. Selain itu, pemantauan juga menyediakan informasi aktual mengenai pelaksanaan kegiatan.

Pemantauan kegiatan Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan 2025–2029 dilakukan melalui:

1. Penyusunan Rencana Aksi Kegiatan

Rencana Aksi Kegiatan disusun untuk periode lima tahun, dan diperbarui apabila terdapat perubahan. Dokumen ini menjadi pedoman dalam manajemen kegiatan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, hingga evaluasi capaian output. Monitoring Rencana Aksi Kinerja dilakukan setiap triwulan bersamaan dengan kegiatan pemantauan dan evaluasi institusi.

2. Review Rencana Aksi Kegiatan

Review dilakukan melalui rapat atau pertemuan untuk menelaah pelaksanaan Rencana Aksi Kegiatan dan permasalahan terkait pencapaian output. Permasalahan teknis dibahas pada tingkat institusi, sedangkan isu strategis yang berimplikasi luas dapat diangkat pada level yang lebih tinggi. Pertemuan rutin diselenggarakan

di awal tahun sebagai dasar penyusunan Rencana Aksi Kinerja tahun berikutnya.

#### B. Evaluasi

Evaluasi berfungsi untuk menilai sejauh mana capaian hasil kegiatan yang telah direncanakan, mengidentifikasi dampak dari suatu kegiatan, serta memberikan dasar dalam pengambilan keputusan guna penyempurnaan program perencanaan di masa mendatang. Evaluasi Rencana Aksi Kegiatan Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan Tahun 2025–2029 dilaksanakan untuk menilai keberhasilan indikator kinerja yang telah ditetapkan selama periode tersebut.

Pelaksanaan evaluasi Rencana Aksi Kegiatan dilakukan melalui:

1. Penilaian tahunan dalam kerangka pengukuran kinerja yang dituangkan ke dalam Laporan Kinerja (LKj) / Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan.
2. Penilaian triwulanan sesuai ketentuan PP Nomor 39 Tahun 2006, dimana laporan triwulanan digunakan sebagai dasar pengukuran capaian kinerja setiap tiga bulan.

#### C. Pengendalian

Pengendalian merupakan rangkaian aktivitas manajemen yang bertujuan memastikan program atau kegiatan terlaksana sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Upaya ini dilakukan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan melalui kegiatan pemantauan dan pengawasan. Pengendalian juga berfungsi sebagai langkah tindak lanjut guna memastikan kesesuaian pelaksanaan dengan perencanaan, yang dilakukan melalui penilaian berupa:

1. Identifikasi terhadap penyimpangan dalam pelaksanaan program/kegiatan;
2. Koreksi atas penyimpangan yang ditemukan;
3. Klarifikasi terhadap hal-hal yang belum jelas dalam pelaksanaan;
4. Konfirmasi terhadap kesesuaian pelaksanaan dengan rencana.

Hasil dari penilaian tersebut menjadi dasar untuk mengambil tindakan korektif apabila terdapat kendala, baik berupa langkah konstruktif maupun tindakan preventif.

## BAB VII

### PENUTUP

Penyusunan Rencana Aksi Kegiatan (RAK) Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan disusun dengan menyesuaikan Permenkes Nomor 13 Tahun 2022 serta RAP Direktorat Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas. Dokumen RAK ini berfungsi sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, serta penilaian kinerja selama periode lima tahun (2025–2029). Melalui rencana aksi ini, pelaksanaan kegiatan dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya dalam program kesehatan masyarakat pada tahun 2025–2029 diharapkan dapat terlaksana secara terarah dan terukur. Selain itu, RAK juga dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi, penilaian kinerja, dan dasar perbaikan perencanaan setiap tahunnya.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi berupa gagasan, waktu, dan tenaga dalam penyusunan Rencana Aksi Kegiatan Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan.

Rencana Aksi Kegiatan Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan 2025–2029 diharapkan mampu mendukung terwujudnya tujuan program kesehatan masyarakat melalui penerapan reformasi birokrasi serta pencapaian nilai kinerja anggaran yang optimal.